
Analisis Framing Pemberitaan Pemilu 2024 Oleh Mahkamah Konstitusi pada Media IDN Times dan KR Jogja

Mezy¹, Muhammad Thoyib Amali²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sastra, Budaya dan Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Email: ¹mezy2100030141@webmail.uad.ac.id, ²muhammad.amali@comm.uad.ac.id

Abstract

This study aims to analyze how two Indonesian online media outlets, IDN Times and KR Jogja, framed news coverage of the 2024 election dispute handled by the Constitutional Court. Using Robert Entman's framing analysis model, this research explores how each media constructs narratives, selects facts, and emphasizes certain issues to shape public perception. The findings reveal that IDN Times tends to present information in a neutral and procedural tone, focusing on legal processes and official statements. In contrast, KR Jogja emphasizes public skepticism and the discourse of electoral justice, using critical language choices and sources that question the fairness of the election. This contrast in media framing impacts how audiences perceive the credibility of the Constitutional Court and the broader legitimacy of Indonesia's electoral democracy. The study highlights that media outlets are not passive conveyors of facts but active agents in constructing political realities. These findings contribute to the field of political communication and media literacy, especially in post-election contexts where public trust in democratic institutions is crucial. The research underscores the importance of critical media consumption and the role of framing in influencing democratic discourse in transitional political environments.

Keywords: *Media Framing, Constitutional Court, Election Dispute, IDN Times, KR Jogja*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dua media daring Indonesia, IDN Times dan KR Jogja, membingkai pemberitaan mengenai sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode analisis framing model Robert Entman, studi ini menyoroti bagaimana masing-masing media membentuk narasi, memilih fakta, dan menekankan isu-isu tertentu dalam membangun realitas publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa IDN Times cenderung menyajikan pemberitaan secara netral dan prosedural, dengan fokus pada tahapan hukum dan pernyataan resmi. Sebaliknya, KR Jogja lebih menekankan aspek kecurigaan publik dan narasi keadilan substantif, dengan pemilihan diksi dan sumber yang cenderung kritis terhadap proses Pemilu. Perbedaan konstruksi realitas ini berdampak pada cara audiens memahami kredibilitas Mahkamah Konstitusi dan dinamika demokrasi elektoral di Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk persepsi publik melalui pilihan framing. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian komunikasi politik dan literasi media, terutama dalam konteks pemberitaan isu-isu demokrasi pasca pemilu.

Kata Kunci: Framing Media, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pemilu, IDN Times, KR Jogja

PENDAHULUAN

Pemilu sering kali disertai dengan potensi konflik. Secara empiris, proses pemilihan umum kerap melahirkan berbagai sengketa, mulai dari masalah teknis administrasi, manipulasi mekanisme pencoblosan, hingga tuduhan adanya praktik kecurangan terstruktur yang menciderai prinsip dasar keadilan dalam sistem elektoral (Mahisa, 2021). Ketika berbagai ketegangan politik dan hukum ini tidak dikelola secara baik, dampaknya dapat mengancam legitimasi pemerintahan yang sah. Di tingkat nasional, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis sebagai garda terakhir dalam menyelesaikan sengketa pilkada dan pemilu (Patoni et al., 2023). Lembaga ini diberi wewenang untuk melindungi keaslian aspirasi rakyat serta menjamin berlakunya supremasi hukum dalam kerangka demokrasi. Akan tetapi, otoritas dan kredibilitas MK tidak selalu diterima tanpa kritik khususnya ketika keputusan yang diambil memiliki konsekuensi politik yang luas. Dalam dinamika ini, MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudisial, tetapi juga bertransformasi menjadi aktor politik penting yang mampu memengaruhi peta kekuasaan nasional (Almalibari, 2022). Maka dari itu, representasi MK dan proses persidangan konstitusional yang dibentuk oleh media memiliki peran sentral dalam membentuk opini publik mengenai integritas sistem demokrasi negara. Dalam kerangka teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Habermas (1996), ruang publik memiliki fungsi vital dalam membentuk opini kolektif melalui dialog rasional yang dimediasi oleh media massa. Namun, idealisme ini sering kali terbentur ketika media justru berperan sebagai aktor dengan agenda tertentu, yang menyaring dan membingkai realitas sosial-politik sesuai dengan kepentingan ideologisnya (Widjajanto, 2022). Dalam konteks sengketa pemilu, cara media membangun narasi terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang independen dan profesional atau sebagai alat kepentingan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana masyarakat memaknai legalitas hasil pemilu.

Konsep framing menjadi sangat relevan untuk memahami fenomena ini. Menurut Entman (1993), framing merupakan mekanisme selektif dalam menekankan aspek-aspek tertentu dari realitas sosial dalam teks komunikasi, dengan tujuan mendefinisikan permasalahan, menganalisis akar masalah, memberikan penilaian normatif, serta menawarkan solusi tertentu. Dalam liputan sengketa pemilu, media dapat memilih untuk menonjolkan dimensi teknis proses persidangan, perilaku para elite politik, atau bahkan mempertanyakan legitimasi eksistensi MK itu sendiri (Daud & Haryadi, 2022). Dengan kata lain, pemberitaan media tidaklah netral, melainkan menjadi arena kompetisi ideologis di mana berbagai kepentingan saling berebut untuk membentuk narasi dominan. Selaras dengan itu, teori Agenda Setting yang dirumuskan oleh McCombs & Shaw (1972) memperkuat argumen bahwa media tidak hanya menentukan isu apa yang menjadi perhatian publik, tetapi juga bagaimana isu tersebut dipahami dan ditafsirkan. Ketika media tertentu seperti IDN Times atau KR Jogja memberikan bobot berbeda terhadap aktor, fakta, dan isu dalam sengketa pemilu, maka secara tidak langsung mereka turut membentuk persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Analisis framing terhadap liputan media terhadap lembaga yudisial konstitusional seperti MK masih tergolong langka, apalagi jika dilakukan secara komparatif antara media nasional dan media lokal (Febrianti & Saptawan, 2023). Padahal, perbedaan orientasi editorial, kedekatan geografis dan politis terhadap kekuasaan nasional, serta karakteristik audiens target dapat memengaruhi bagaimana satu peristiwa yang sama diberitakan dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian ini hadir untuk mengeksplorasi gap tersebut dengan menganalisis perbedaan framing antara IDN Times

dan KR Jogja terhadap sengketa pemilu yang ditangani oleh MK dalam pemilu tahun 2024.

Pemilihan IDN Times dan KR Jogja sebagai subjek penelitian didasari oleh pertimbangan strategis yang matang. IDN Times hadir sebagai salah satu platform media digital nasional yang secara khusus menargetkan audiens generasi muda melalui penyampaian berita yang dinamis, cepat, dan berbasis teknologi digital (Wibowo, 2019). Media ini memiliki jangkauan yang luas, mencakup berbagai topik dari nasional hingga internasional, serta membangun citra sebagai media yang berpihak pada generasi milenial dengan mengedepankan kecepatan distribusi informasi dan fokus pada isu-isu yang sedang trending (Purnama & Sartini, 2023). Dalam konteks liputan sengketa pemilu, IDN Times mencerminkan bagaimana media nasional membentuk narasi politik dengan cakupan yang luas dan strategis, yang kemungkinan besar membawa muatan agenda tertentu yang selaras dengan dinamika kekuasaan di tingkat nasional.

Di sisi lain, KR Jogja (Kedaulatan Rakyat) merupakan media lokal yang memiliki akar kuat di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan sejarah panjang sebagai surat kabar tertua di Yogyakarta sejak tahun 1945, KR Jogja cenderung mengadopsi pendekatan jurnalistik yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan komunitas pembacanya (Adikara, 2022). Dalam peliputan isu nasional seperti sengketa pemilu, media lokal semacam KR Jogja sering kali menyajikan perspektif yang lebih berpijak pada realitas lokal, serta menekankan dampak lokal atau reaksi dari kalangan elite dan masyarakat setempat. Sudut pandang ini menjadi penting untuk diteliti karena dapat menunjukkan bagaimana informasi yang identik dapat dipersepsikan dan dikemas secara berbeda oleh media dengan skala operasional, basis pembaca, dan orientasi editorial yang berbeda.

Kebutuhan untuk membandingkan kedua media ini terletak pada bagaimana pembentukan wacana publik terjadi secara multi-lapis, antara level nasional dan lokal. Dalam kajian komunikasi politik serta jurnalisme kritis, dinamika ini memiliki signifikansi penting untuk memahami apakah terdapat kesenjangan pandangan, kesamaan interpretasi, atau bahkan terjadi polarisasi dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap institusi yudisial seperti Mahkamah Konstitusi (Ikasari et al., 2020). Di sinilah nilai tambah penelitian ini terletak, yakni mengungkap bagaimana dua sumber informasi dengan orientasi dan segmentasi berbeda membangun narasi terhadap isu politik yang sama, serta bagaimana konsekuensinya terhadap pembentukan opini publik baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun secara horizontal (antar-segmen sosial).

Berdasarkan data SimilarWeb per Mei 2024, IDN Times berhasil menempati posisi 15 besar media online yang paling banyak diakses di Indonesia dengan jumlah kunjungan mencapai lebih dari 25 juta per bulan. Media ini menjalankan misi sebagai voice of millennials and Gen Z, dengan konten yang dirancang khusus untuk menjangkau pengguna platform sosial dan pembaca muda. Dari segi editorial, IDN Times menggabungkan nilai berita dengan gaya infotainment, judul yang mudah dipahami, dan sering kali menonjolkan aspek emosional, konflik, serta keterlibatan figur publik dalam narasi politik. Dalam konteks sengketa pemilu, pendekatan ini berpotensi memperkuat polarisasi atau membentuk framing yang lebih dramatis terutama jika ditujukan untuk meningkatkan klik dan engagement.

Sementara itu, KR Jogja (Kedaulatan Rakyat) adalah surat kabar cetak dan digital dengan akar sejarah yang panjang sejak tahun 1945. Meskipun tidak memiliki tingkat trafik yang setinggi media nasional, KR Jogja tetap menjadi referensi penting di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, dengan fokus pemberitaan pada isu-isu lokal dan regional. Basis pembacanya cenderung lebih beragam secara usia dan umumnya loyal terhadap format pemberitaan tradisional yang mengutamakan narasi yang linier dan deskriptif (Nurjanah

& Hastasari, 2021). Berdasarkan observasi terhadap konten yang dihasilkan, KR Jogja sering meletakkan berita politik nasional dalam kerangka lokal misalnya dengan menghadirkan tokoh daerah, respon ormas setempat, atau dampaknya terhadap kondisi sosial di Yogyakarta. Dalam kerangka framing, pendekatan seperti ini dapat membentuk wacana yang lebih inklusif atau bahkan menawarkan perspektif alternatif terhadap narasi dominan nasional.

Perbedaan signifikan juga terlihat dalam hal hubungan dengan kekuasaan. IDN Times berada dalam spektrum wacana nasional, sering kali mengutip pandangan elite politik pusat, dan memposisikan MK dalam kerangka institusi negara yang berdaulat. Sebaliknya, KR Jogja sebagai media lokal lebih terhubung dengan realitas komunitas grassroot dan berpotensi menghadirkan narasi kritis atau alternatif terhadap legitimasi proses hukum. Perbandingan ini menjadi penting karena dapat mengungkap bagaimana framing media memengaruhi kepercayaan publik terhadap MK secara berbeda tergantung dari sumber dan cara informasi tersebut dikonsumsi.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kajian ilmu komunikasi massa, framing telah menjadi salah satu kerangka teoretis yang paling dominan digunakan untuk memahami cara media membentuk konstruksi realitas sosial-politik. Framing tidak hanya terbatas pada pemilihan konten yang akan disajikan, namun menyangkut bagaimana suatu peristiwa, aktor, atau persoalan disusun secara simbolik sehingga menghasilkan pemaknaan tertentu dalam persepsi audiens (Araújo & Prior, 2021). Dalam kerangka demokrasi elektoral, khususnya terkait sengketa hasil pemilihan umum, framing media memiliki peran krusial dalam membentuk opini publik, menumbuhkan kepercayaan atau skeptisisme terhadap lembaga hukum, bahkan memperkuat atau melemahkan legitimasi dari keseluruhan proses demokrasi.

Robert Entman (1993) merumuskan kerangka teoretis framing yang berpengaruh dengan menekankan empat fungsi inti dalam praktik pbingkai media yaitu mendefinisikan permasalahan (*define problems*), menganalisis akar penyebab (*diagnose causes*), memberikan penilaian normatif (*make moral judgments*), dan menawarkan solusi atau rekomendasi (*suggest remedies*). Artinya, framing melibatkan serangkaian pertimbangan editorial yang secara selektif menekankan aspek-aspek tertentu dari suatu isu, sementara aspek lainnya disisihkan, sehingga menciptakan narasi yang terarah.

Dalam konteks liputan sengketa pemilu yang ditangani Mahkamah Konstitusi, keempat dimensi tersebut menjadi sangat relevan untuk dianalisis. Cara media seperti IDN Times atau KR Jogja memaknai sengketa tersebut sebagai bagian wajar dari proses hukum demokratis, sebagai indikasi delegitimasi hasil pemilu, atau bahkan sebagai manifestasi krisis kepercayaan publik terhadap institusi. Selanjutnya, subjek yang digambarkan sebagai akar masalah, apakah para peserta pemilu, penyelenggara pemilihan, atau justru institusi hukum itu sendiri (Ikhwan, 2023). Aspek penilaian moral dalam narasi media juga perlu dikaji lebih lanjut terkait apakah Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai lembaga yang netral, memiliki kepentingan politik, atau justru bermasalah. Terakhir, apakah media menawarkan arah penyelesaian baik secara eksplisit maupun tersirat seperti ajakan kepada publik, tuntutan terhadap reformasi sistem hukum, atau penekanan pada pentingnya proses rekonsiliasi nasional ?

Pendekatan framing berdasarkan konsep Entman memberikan kerangka metodologis yang sistematis untuk memahami bagaimana media tidak sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi juga aktif dalam membentuk struktur wacana yang memengaruhi cara publik memahami, mengevaluasi, dan merespons suatu isu. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini akan mengungkap pola narasi yang dibangun oleh media digital nasional (IDN Times) dan media lokal (KR Jogja) dalam memberitakan penyelesaian sengketa

pemilu oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024. Dengan demikian, maka pertanyaan penelitian ini adalah "bagaimana IDN Times dan KR Jogja membingkai isu sengketa pemilu 2024 yang ditangani Mahkamah Konstitusi dalam pemberitaannya?"

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara komprehensif bagaimana media membangun konstruksi realitas melalui mekanisme framing dalam pemberitaan. Metodologi kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna-makna tersembunyi yang terkandung dalam teks berita, serta memahami bagaimana pesan-pesan tersebut membentuk wacana publik mengenai Mahkamah Konstitusi dalam konteks sengketa pemilu 2024 (Sugiyono, 2023). Data primer penelitian ini terdiri dari dokumen teks berita digital yang diterbitkan oleh IDN Times dan KR Jogja selama periode penanganan sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya antara bulan Maret hingga Mei 2024. Pemilihan media dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan representasi media nasional (IDN Times) dan lokal (KR Jogja), serta perbedaan karakteristik audiens dan orientasi editorial. Artikel berita yang digunakan akan disaring menggunakan kata kunci seperti: "sengketa pemilu 2024", "Mahkamah Konstitusi", "persidangan PPHU", dan "MK putusan hasil pemilu". Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengunduh dan mengarsipkan berita dalam format teks untuk keperluan analisis selanjutnya.

Penelitian ini menerapkan model analisis framing yang dikembangkan oleh Robert Entman (1993). Model ini mengkaji empat komponen inti dalam proses pembingkai media, yaitu:

1. *Define Problems*- cara suatu peristiwa atau isu dipresentasikan sebagai persoalan.
2. *Diagnose Causes*-identifikasi terhadap pihak atau faktor yang dianggap sebagai akar masalah.
3. *Make Moral Judgments*-evaluasi normatif yang disajikan terhadap aktor atau kejadian.
4. *Suggest Remedies*-rekomendasi solusi atau tindakan yang diajukan atau dibenarkan.

Proses analisis dilakukan melalui pembacaan intensif setiap teks berita, identifikasi isi dari keempat elemen framing tersebut, kemudian dilanjutkan dengan perbandingan antar media. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk tabel komparatif dan dijelaskan secara deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa IDN Times dan KR Jogja menerapkan strategi pembingkai (framing) yang berbeda dalam mengangkat isu sengketa pemilu 2024 yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK). Perbedaan signifikan ini terlihat dalam cara kedua media mendefinisikan permasalahan, mengidentifikasi akar penyebab, memberikan penilaian normatif, dan menawarkan solusi penyelesaian.

Definisi Permasalahan (Define Problems)

IDN Times cenderung memosisikan sengketa pemilu sebagai manifestasi alami dari dinamika demokratisasi, dengan penekanan kuat pada aspek prosedural, yaitu cara gugatan diajukan, mekanisme persidangan berjalan, dan keputusan akhir diambil. Sebagai contoh, pemberitaan dengan judul "*MK Tolak Gugatan AMIN soal DPT dan DPK*" mencerminkan fokus utama pada aspek legalitas dan tata cara hukum (IDN Times, 2024b). Sebaliknya, KR Jogja lebih menekankan dimensi ketegangan politik dan anomali dalam proses pemilu, khususnya melalui sorotan intens terhadap postur dan keputusan MK. Artikel seperti "*MK Mulai Sidangkan Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini*" dan

"*Pengacara AMIN: Pemilu Sarat Kecurangan!*" menonjolkan suasana kecurigaan serta ketidakpuasan masyarakat terhadap integritas mekanisme pemilihan (IDN Times, 2024a). Perbedaan pendekatan ini mengindikasikan bahwa IDN Times membingkai MK sebagai lembaga hukum yang netral, sedangkan KR Jogja lebih skeptis terhadap potensi disfungsi struktural dalam institusi tersebut.

Dalam konteks sengketa Pemilu 2024, media massa memiliki peran strategis dalam membentuk cara publik memahami dan menafsirkan suatu persoalan. Pada level ini, elemen *define problems* dalam kerangka framing Entman menjadi sangat signifikan, karena media tidak hanya berfungsi sebagai penyalur informasi, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif menafsirkan dan memilih aspek-aspek tertentu dari realitas politik untuk dibawa ke ruang diskursus publik (Setiawan et al., 2023). IDN Times, sebagai platform media digital nasional yang menargetkan audiens generasi milenial, cenderung membingkai sengketa pemilu dengan penekanan pada dimensi politisasi isu dan dinamika institusional. Dalam sajian beritanya, permasalahan utama yang disoroti adalah ketegangan antara pasangan calon presiden dan ketidakpuasan terhadap hasil rekapitulasi KPU. Sejumlah artikel mengarahkan fokus pada strategi politik tim hukum pasangan calon yang menyampaikan argumentasi di Mahkamah Konstitusi, seolah-olah sengketa lebih merupakan pertarungan narasi ketimbang persoalan validitas data. Dengan demikian, IDN Times mendefinisikan permasalahan sebagai fragmentasi politik dan persaingan legitimasi di ranah hukum, yang mencerminkan kepentingan kelompok elite. Di sisi lain, KR Jogja (Kedaulatan Rakyat), sebagai media lokal yang berbasis di Yogyakarta, membingkai permasalahan dari sudut pandang yang lebih normatif dan prosedural. Pemberitaan KR Jogja cenderung memosisikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berperan menjaga stabilitas demokrasi dan penegakan konstitusi. Alih-alih menyoroti konflik antar elite, KR Jogja lebih banyak mengangkat aspek mekanisme hukum, jadwal persidangan, dan tata cara pembuktian, sehingga definisi masalah yang dibangun berpusat pada kebutuhan menjaga ketertiban demokrasi dan kepercayaan terhadap institusi hukum. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kedua media memiliki perspektif berbeda dalam mendefinisikan krisis (Hafidli et al., 2023). Jika IDN Times mengonstruksinya sebagai krisis politik yang membutuhkan perhatian publik terhadap posisi para aktor, maka KR Jogja mengonstruksinya sebagai perkara hukum yang harus dijalani sesuai aturan demi menjaga ketertiban nasional. Perbedaan framing ini memengaruhi cara pembaca memaknai urgensi, bobot permasalahan, dan pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaiannya. Lebih lanjut, pendekatan IDN Times yang lebih dramatik dan politis berpotensi memperkuat polarisasi opini publik, sementara pendekatan KR Jogja justru menciptakan rasa tenang dan ketertiban dengan menekankan legitimasi proses hukum. Di sinilah tampak bahwa framing bukan sekadar konten yang diberitakan, melainkan juga bagaimana realitas itu dikonstruksi untuk menciptakan efek kognitif dan emosional tertentu pada audiens.

Perbedaan itu juga tercermin dalam pilihan diksi dan angle pemberitaan. Dalam salah satu artikel IDN Times berjudul "*Sidang Gugatan Pilpres 2024 Digelar Hari Ini, Ini Jadwalnya*", narasi diarahkan pada urutan prosedur dan informasi teknis seperti waktu, pihak yang hadir, dan agenda sidang, tanpa menyentuh persoalan substansial mengenai dugaan kecurangan atau ketegangan politik. Frasa seperti "*MK akan mendengarkan keterangan dari pemohon, termohon, dan pihak terkait*" menunjukkan bagaimana media ini menempatkan permasalahan dalam kerangka administratif yang netral. Sebaliknya, KR Jogja secara eksplisit mengaitkan sengketa pemilu dengan krisis kepercayaan publik. Dalam berita berjudul "*Bukti Kecurangan Dipertontonkan di Sidang MK, AMIN Desak Penyelidikan Serius*", muncul frasa seperti "*indikasi kuat manipulasi struktural*" atau "*keraguan publik terhadap netralitas penyelenggara*". Pilihan-pilihan ini merefleksikan

konstruksi masalah yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan politis. Dalam narasi KR Jogja, sengketa bukan sekadar prosedur, melainkan tanda dari retaknya integritas pemilu sebagai institusi demokratis. Dengan menampilkan kutipan dan penekanan semacam itu, semakin terlihat bahwa kedua media tidak sekadar melaporkan fakta, melainkan secara aktif membentuk persepsi publik tentang *apa yang sebenarnya menjadi masalah utama* dalam sengketa hasil Pemilu 2024.

Diagnosis Akar Penyebab (Diagnose Causes)

IDN Times secara umum tidak memberikan analisis mendalam mengenai pihak-pihak yang dianggap sebagai akar masalah sengketa. Fokus utama mereka tertuju pada narasi "siapa menggugat siapa" dan proses hukum yang berlangsung. Sebagai contoh, dalam berita "*MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini*". isi artikel hanya merinci kronologi jadwal, daftar permohonan, dan susunan hakim, tanpa menyertakan pembahasan lebih lanjut mengenai dugaan kecurangan atau pertanggungjawaban penyelenggara pemilu. Frasa-frasa seperti "*pemohon akan diberikan waktu 30 menit untuk menyampaikan argumen*" atau "*sidang digelar terbuka untuk umum*" menunjukkan pendekatan deskriptif yang prosedural. Pola ini mencerminkan framing yang relatif netral, bahkan cenderung under-framing, karena tidak mengungkap dinamika kekuasaan yang lebih kompleks atau mempertanyakan institusi mana yang mungkin menjadi sumber persoalan.

Pola ini mencerminkan framing yang relatif netral, bahkan cenderung under-framing, karena tidak mengungkap dinamika kekuasaan yang lebih kompleks. Sementara itu, KR Jogja justru memberikan ruang yang lebih luas bagi narasi yang menyoroti pihak penguasa atau penyelenggara pemilu sebagai subjek yang patut dipertanyakan. Beberapa liputan menyertakan pernyataan dari pihak AMIN atau akademisi yang mengungkapkan adanya dugaan kecurangan terstruktur. Dalam artikel berjudul "*Pengacara AMIN: Pemilu Sarat Kecurangan!*" (KR Jogja, 2024a), disoroti pernyataan kuasa hukum yang menyebut adanya "*mobilisasi aparat*", "*manipulasi hasil rekapitulasi*", dan "*penggunaan kekuasaan negara secara tidak adil untuk memenangkan paslon tertentu*." Selain itu, artikel "*Saksi Sebut Dapat Tekanan Saat Rekapitulasi, MK Diminta Usut*" mengangkat testimoni yang menyiratkan adanya intervensi terhadap proses administrasi pemilu. Framing semacam ini menempatkan penyelenggara negara sebagai entitas yang perlu dimintai pertanggungjawaban. KR Jogja dengan demikian menggunakan pendekatan *accountability-oriented framing*, yang tidak hanya menyajikan prosedur hukum, tetapi juga menggali kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilu. Dengan demikian, KR Jogja menggunakan framing yang lebih *accountability-oriented*, dengan mempertanyakan peran aktor politik tertentu atau lembaga penyelenggara sebagai sumber utama permasalahan.

Perbedaan dalam cara IDN Times dan KR Jogja membingkai sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri hingga ke akar penyebab yang mencakup orientasi redaksional, segmentasi audiens, serta afiliasi nilai-nilai jurnalistik yang diusung masing-masing media. IDN Times, sebagai media digital nasional yang menargetkan pembaca muda, urban, dan *digital-savvy*, cenderung menyoroti sisi kontestasi politik yang dramatis dan naratif. Hal ini tercermin dari pilihan kata, judul, dan struktur berita yang menempatkan konflik dan ketegangan sebagai elemen utama. Strategi ini tidak hanya bertujuan menarik klik (*clickbait strategy*), tetapi juga merefleksikan kebutuhan akan engagement yang tinggi di tengah persaingan platform digital (Farida & Yoedjadi, 2020). Sebaliknya, KR Jogja sebagai media lokal dengan basis pembaca yang lebih heterogen secara usia dan cenderung berorientasi pada stabilitas sosial-politik lokal, mengedepankan pemberitaan yang lebih prosedural dan netral.

Dalam konteks ini, penyajian informasi lebih berfokus pada legalitas proses, keterangan resmi, dan posisi netral Mahkamah Konstitusi, ketimbang pada narasi konflik antara elite politik. Hal ini merefleksikan preferensi KR Jogja terhadap prinsip kehati-hatian dalam menjaga kredibilitas lokal serta keterikatan historisnya sebagai media komunitas dengan nilai edukatif. Lebih lanjut, pendekatan pemberitaan masing-masing media juga dipengaruhi oleh faktor struktural dalam industri media itu sendiri, termasuk tekanan terhadap trafik, kebutuhan akan pembiayaan berbasis iklan, dan algoritma distribusi di media sosial. Dalam konteks ini, framing tidak berdiri sendiri sebagai hasil keputusan editorial semata, melainkan merupakan respons terhadap tekanan sistemik dalam ekosistem informasi digital kontemporer.

Penilaian Normatif (Make Moral Judgments)

Dalam pemberitaan IDN Times, keputusan MK disajikan tanpa nuansa moral yang kental cenderung mengikuti prinsip *just-the-facts journalism*. Narasi seperti "*MK menolak seluruh permohonan*" disampaikan secara singkat dan tanpa interpretasi mendalam. Hal ini mencerminkan sikap media yang berusaha mempertahankan posisi netral, meskipun berisiko terkesan mengabaikan sensitivitas publik terhadap keadilan substansial. Berbeda dengan itu, KR Jogja memberikan penekanan moral yang lebih tajam. Melalui pemilihan kutipan-kutipan bernada emosional dari penasihat hukum atau aktivis sipil, mereka membangun kesan bahwa sengketa ini bukan sekadar persoalan hukum teknis, tetapi juga isu keadilan sosial dan integritas demokrasi yang sedang dipertaruhkan (Nainggolan & Suratnoaji, 2023). Cara media membingkai sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang netral dari segi etika. Pemilihan sudut pandang, pemilihan kata, dan fokus pemberitaan memiliki konsekuensi moral yang signifikan terhadap cara masyarakat memahami legitimasi proses demokrasi.

Dalam konteks ini, IDN Times yang lebih menekankan dramatisasi konflik antar elite politik dapat dinilai memperkuat persepsi publik bahwa proses hukum di MK hanyalah kelanjutan dari perseteruan politik biasa. Framing semacam ini berpotensi mereduksi pemahaman masyarakat terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang independen, serta menurunkan kepercayaan terhadap jalur hukum sebagai mekanisme penyelesaian sengketa (Pujiningtyas, 2020). Sebaliknya, KR Jogja yang cenderung menyajikan narasi prosedural dan netral bisa dipandang dari segi etika lebih bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Namun, moralitas framing yang terlalu netral dan formalistik juga bisa dinilai bermasalah apabila mengabaikan dinamika politik yang sebenarnya terjadi di balik proses hukum. Dalam hal ini, KR Jogja berisiko gagal memenuhi fungsi media sebagai watchdog dan pembuka ruangkritik terhadap potensi ketimpangan atau manipulasi proses.

Oleh karena itu, dari segi etika, kedua media menunjukkan dilema moral dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya. Di satu sisi, ada tuntutan untuk menjaga objektivitas dan mencegah polarisasi, namun di sisi lain, ada tanggung jawab untuk mengedukasi publik secara kritis tentang kerumitan politik dan hukum dalam pemilu. Penilaian etika terhadap framing pemberitaan tidak dapat dilepaskan dari konteks institusional dan tekanan industri yang dihadapi masing-masing media. Meskipun demikian, idealnya media massa tetap harus mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, dan kepentingan publik dalam membingkai isu-isu krusial seperti sengketa pemilu.

Solusi yang Ditawarkan (Suggest Remedies)

IDN Times tidak secara eksplisit mengajukan rekomendasi penyelesaian, karena lebih terfokus pada proses hukum yang sedang berlangsung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan oleh media ini adalah *trust the system* mengikuti jalur

hukum formal yang telah ditetapkan. Berbeda halnya dengan KR Jogja yang cenderung menyuarakan tuntutan untuk evaluasi institusional, pembenahan mekanisme penyelenggaraan pemilu, dan peningkatan transparansi. Dalam beberapa artikelnya, mereka memberikan ruang bagi opini yang menekankan pentingnya penguatan sistem *checks and balances* dalam kerangka demokrasi.

Sebagai aktor penting dalam sistem demokrasi, media massa memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyajikan berita, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian masalah publik melalui narasi yang konstruktif (Sobari & Purnama, 2020). Dalam konteks sengketa Pemilu 2024 yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, IDN Times dan KR Jogja memiliki kesempatan untuk membingkai berita secara lebih solutif dengan cara mendorong partisipasi publik yang sehat dan memperkuat kepercayaan terhadap institusi demokrasi. IDN Times, sebagai contoh, dapat memperluas narasi dari sekadar konflik antar elite menjadi wacana yang mendorong literasi hukum publik. Framing yang memposisikan Mahkamah Konstitusi sebagai ruang deliberatif dan bukan hanya medan konflik akan membantu masyarakat melihat jalur hukum sebagai mekanisme penyelesaian yang sah dan rasional. IDN Times juga bisa menyisipkan edukasi mengenai prosedur sengketa pemilu, memperkenalkan aktor-aktor kunci di balik keputusan hukum, serta menampilkan suara masyarakat sipil yang memantau proses ini. Sementara itu, KR Jogja yang cenderung bersifat prosedural dapat menambahkan elemen jurnalisme investigatif atau jurnalisme data untuk menunjukkan pola-pola atau preseden dalam sengketa pemilu sebelumnya, sehingga pemberitaannya tidak hanya informatif tetapi juga analitis. KR Jogja juga dapat memberi ruang bagi suara-suara minoritas atau pengamat independen untuk memperkaya perspektif dalam pemberitaan, sehingga tidak terjebak dalam narasi birokratik semata. Kedua media seharusnya mengembangkan framing yang tidak hanya menjelaskan siapa yang benar atau salah dalam sengketa, tetapi juga menekankan pentingnya integritas pemilu, kepercayaan pada lembaga yudikatif, serta urgensi menjaga kohesi sosial pasca pemilu. Dengan pendekatan ini, media berkontribusi langsung terhadap pemulihan demokrasi dan pembentukan masyarakat yang lebih kritis, tidak hanya menjadi konsumen informasi pasif, tetapi juga subjek aktif dalam proses politik.

Perbedaan dalam cara kedua media menawarkan solusi terhadap sengketa Pemilu 2024 terlihat dari pendekatan naratif yang mereka terapkan. IDN Times menekankan pentingnya mempercayai proses hukum dan lembaga formal. Dalam berita berjudul "*MK Mulai Sidangkan Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini*", media ini menggarisbawahi bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat yang tepat untuk menyelesaikan sengketa secara adil, serta menyebut bahwa semua pihak telah hadir dengan "gugatan yang sistematis" dan "tanggapan konstruktif dari termohon". Narasi seperti ini mendorong pembaca untuk menerima hasil melalui jalur hukum yang ada, dan menghindari polarisasi publik lebih lanjut. Sebaliknya, KR Jogja tidak hanya mendorong kepercayaan terhadap lembaga, tetapi juga menyerukan perlunya evaluasi institusional.

Dalam artikel yang memuat pernyataan "Ada Anomali Sistematis dalam Pemilu", KR Jogja mengangkat pentingnya audit terhadap pelaksanaan pemilu dan peningkatan integritas penyelenggara. Penekanannya lebih bersifat struktural dan menyorot akar permasalahan sistemik. Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya diversifikasi narasi media agar publik tidak hanya diarahkan pada penerimaan hasil, tetapi juga terdorong untuk berpartisipasi dalam evaluasi demokrasi secara kritis. Media disarankan tidak berhenti pada pelaporan prosedural, namun juga mengedepankan diskursus reformasi kelembagaan dan pendidikan politik publik. Bagi masyarakat, kedua narasi ini seharusnya dapat memperkaya cara mereka memaknai sengketa politik: sebagai ruang untuk memperkuat demokrasi, bukan sekadar ajang untuk memihak.

PENUTUP

Perbandingan antara IDN Times dan KR Jogja menunjukkan perbedaan signifikan dalam orientasi pemberitaan dalam membongkar sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. IDN Times cenderung menekankan netralitas dan proseduralisme dengan mengedepankan kronologi kejadian dan pernyataan resmi dari pihak terkait. Sementara itu, KR Jogja membongkar isu dengan pendekatan yang lebih kritis dan menyoroti suara publik, mempertanyakan tingkat transparansi proses serta menampilkan narasi yang mengedepankan keadilan substantif. Konstruksi realitas ini berimplikasi langsung pada pembentukan persepsi masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai institusi penengah dalam konflik demokrasi. Jika IDN Times membangun kepercayaan masyarakat melalui narasi prosedural yang menekankan legalitas, KR Jogja justru mendorong kesadaran kritis publik terhadap potensi kelemahan sistem. Perbedaan ini memperlihatkan bagaimana media memiliki peran aktif dalam menentukan arah kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan legitimasi lembaga yudikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, G. J. (2022). Editorial policy of Kedaulatan Rakyat, Tribun Jogja, and Harian Jogja in reporting regional management by Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. *Informasi*, 52(2). <https://doi.org/10.21831/informasi.v52i2.50521>
- Almalibari, K. T. (2022). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.45>
- Araújo, B., & Prior, H. (2021). Framing Political Populism: The Role of Media in Framing the Election of Jair Bolsonaro. *Journalism Practice*, 15(2). <https://doi.org/10.1080/17512786.2019.1709881>
- Daud, R. F., & Haryadi, S. (2022). Membangun Citra Positif Masyarakat terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Upaya Memperkuat Legitimasi. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 3(2). <https://doi.org/10.31849/joels.v3i2.9013>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4).
- Farida, L., & Yoedadi, M. G. (2020). Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden 2019 (Analisis Framing Pemberitaan Kampanye Pilpres 2019 pada Medcom.id). *Koneksi*, 3(2). <https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6395>
- Febrianti, D., & Saptawan, E. K. (2023). Framing Kegagalan Pemerintah Pada Media Sosial Partai Keadilan Sejahtera Jelang Pemilu 2024. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(2). <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.3142>
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hafidli, M. N., Nur, R., Lestari Sasmita, D., Nurazhari, L., Rahisa, N., & Putri, G. (2023). Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Kasus Kanjuruhan Di Detikcom Dan Bbc News. In *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 3, Issue 1).
- IDN Times. (2024a). MK Mulai Sidangkan Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini. *IDN Times*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/mk-mulai-sidangkan-sengketa-pilpres-2024-hari-ini>

- IDN Times. (2024b). MK Tolak Gugatan Hasil Pileg yang Diajukan PKB dan PPP. In *IDN Times*.
- Ikasari, P. N., Setya Arifina, A., Tidar, U., & Suparman, J. K. (2020). Framing Joko Widodo Dan Prabowo Subianto Di Harian Kompas Dalam Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 4(1).
- Ikhwan, M. (2023). Politics Entertainment di Media Online: Analisis Pemberitaan Bakal Calon Presiden Pemilu 2024 di Detik.com. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2).
- Mahisa, N. (2021). Analisis Gerakan Sosial Baru: Studi Kasus Gerakan Black Lives Matter Terhadap Pemilihan Presiden Amerika Serikat Tahun 2020. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(2). <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i2.33>
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2).
- Nainggolan, I. D. P., & Suratnoaji, C. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Ganjar Pranowo Menolak Kehadiran Timnas Israel di Indonesia pada Mediaindonesia.com. *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i2.923>
- Nurjanah, D., & Hastasari, C. (2021). Citra Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Koran Lokal (Analisis Wacana Kritis pada Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja Periode Januari – Desember 2017). *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(4). <https://doi.org/10.21831/lektur.v3i4.16956>
- Patoni, R., Wibowo, G. D., & Cahyowati, R. (2023). Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada. *Indonesia Berdaya*, 4(3). <https://doi.org/10.47679/ib.2023528>
- Pujiningtyas, P. (2020). Pidato Joko Widodo Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi: Representasi Ideologi Dan Kekuasaan (Joko Widodo's Speech Following The Constitutional Court Of Indonesia Judgement: The Representation Of Ideology And Power). *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa*, 18(1). <https://doi.org/10.26499/metalingua.v18i1.398>
- Purnama, M. W., & Sartini, N. W. (2023). Analysis of Criticism of Newspaper by Jokowi & Joe Biden regarding the Development of Covid-19 in the IDN Times and NY Times Online Media: Cross-Cultural Pragmatic Studies. *Journal of Pragmatics Research*, 5(2). <https://doi.org/10.18326/jopr.v5i2.220-244>
- Setiawan, G. B. R., Mayasari, & Yusup, E. (2023). Analisis Framing Model Robert Entman Mengenai Media Online Kompas.Com Dan Liputan6.Com Dalam Menampilkan Tayangan Pemberitaan Tenggelamnya Jakarta Tahun 2023-2050. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1).
- SimilarWeb. (2025). *Website Traffic Analytics for idntimes.com*. Global Rank: #2.910; Country Rank (Indonesia): #99; Monthly Visits: 19 juta. SimilarWeb.
- Sobari, T., & Purnama, A. (2020). Analisis Framing pada Koran Pikiran Rakyat dan Kompas.com. *Linguista: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, 4(2). <https://doi.org/10.25273/linguista.v4i2.6442>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Wibowo, A. T. (2019). Konstruksi Realitas Media Online atas Pemberitaan Debat Kandidat pada Pemilihan Presiden 2019. *Nyimak: Journal of Communication*, 3(2). <https://doi.org/10.31000/nyimak.v3i2.1780>
- Widjajanto, A. (2022). Paradigma Pengadilan Pemilu Dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Pemilukada. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2541>